Grand Teori: **Manajemen Keuangan**

Middle Teori: **Financial Behaviour**

Apply: **Financial Technology and Financial Inclusion**

Intro :

**Financial Technologi dan Inklusi Keuangan**

Financial Technology atau yang biasa kita kenal dengan sebutan fintech yaitu sebuah inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern sebagai penghubung antara penyedia jasa finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. Fintech secara umum merupakan industri baru di sektor ekonomi. Sebuah inovasi baru yang dikembangkan untuk menciptakan layanan keuangan atau perbankan menjadi lebih baik dan efisien karena memanfaatkan kehadiran teknologi.

Kemunculan fintech di Indonesia masih tergolong baru. Pada tahun 2006 - 2010 pelaku fintech hanya ada di angka 7%. Kemudian terus berkembang 6% pada tahun 2011 – 2012. Naik 9% pada tahun 2013 – 2014. Kemudian pada tahun 2015 dibentuk sebuah wadah untuk menghimpun para pelaku fintech yang bernama Asosiasi Fintech Indonesia (AFI). Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan guna membangun ekosistem fintech di Indonesia. Kemunculan AFI mendorong perkembangan fintech. Pada tahun 2015 – 2016, perkembangan fintech naik sebesar 78%, tercatat 134 – 140 perusahaan. Dan pada tahun 2016 – 2017 meningkat sebesar 39% menjadi 188 – 196 perusahaan.

|  |
| --- |
|  |
| Gambar 1.3 Sumber: DailySocial.id Fntect Report 2016 |
|  |
| Gambar 1.4 Sumber: DailySocial.id Fintech Report 2017 |

Bisnis fintech Indonesia diyakini berkembang pesat dalam beberapa waktu mendatang. Pasalnya, nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2016 diestimasi sudah mencapai US$14,5 miliar, atau berkontribusi sebesar 0,6% dari transaksi global yang mencapai US$2,356 miliar. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai US$130 miliar di tahun 2020, dengan transaksi yang didominasi oleh e–commerce, marketplace, dan perusahaan fintech. Menurut Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa “Prospek pertumbuhan fintect di Indonesia cukup besar dan akan semakin progresif”.

Fintech sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari pengolahan aset, penggalangan dana (*crowd funding), e-money, p2p lending, payment gateway, remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dan banyak perusahaan fintech yang sudah mulai terkenal, seperti kitabisa.com yang yang bergerak di bidang crowd funding, lalu modalku.com di bidang p2p lending, dan tentu saja perusahaan start up yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di masyarakat seperti Gojek mengeluarkan Go-Pay. Bukalapak mengeluarkan Buka Dompet, dan masih banyak yang lainnya.

Kehadiran fintech diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan kemudahannya. Selain itu fintech juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri merupakan pernyataan dimana orang dewasa memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan jasa keuangan resmi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dijelaskan oleh *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) “state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options.*” (CGAP-GPFI).

OJK mencatat bahwa saat ini perusahaan fintech yang ada di Indonesia dalam bentuk peer to peer lending sebanyak 150 perusahaan agar bisa ikut masuk dan berkontribusi dalam mensukseskan program inklusi keuangan. Selain itu, menurut Mantan Direktur Bank Sinarmas Freenyan Liwang, perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang pembayaran atau pembiayaan UMKM menjadi bagian dari solusi dalam merealisasikan program pemerintah tentang inklusi keuangan.

Dukungan OJK terhadap fintech sejalan dengan program Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara “Digital Economy” terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 salah satunya melalui kebijakan inklusif keuangan yang diterbitkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Hingga saat ini kondisi akses keuangan di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini tercemin dari rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Survey terakhir yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2017 menunjukan inklusi keuangan Indonesia berada di angka 49%. Dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk dewasa Indonesia, hanya 49 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Sedangkan pemerintah menargetkan inklusi keuangan Indonesia mencapai 75% di tahun 2019.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan 5 (lima) pilar penyangga SNKI. Pertama, Edukasi Keuangan. Kedua, Hak Properti Masyarakat yang sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan. Kemudian ketiga, Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Keempat, Perlindungan Konsumen. Dan terakhir, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan. Harapan pemerintah, dengan meningkatnya indeks inklusi keuangan Indonesia, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

Keberadaan fintech memberikan dampak positif bagi industri layanan keuangan, karena mampu meningkatkan penetrasi pasar bagi lembaga keuangan. Dengan model bisnis penggunaan teknologi, efisiensi, kecepatan, peniadaan kendala konvensional seperti keadaan geografis dan waktu pelayanan yang dimiliki oleh fintech.

Sementara dari sisi masyarakat, fintech mempermudah akses berbagai informasi terkait berbagai jenis produk dan layanan keuangan. Selanjutnya masyarakat dapat memanfaatkannya untuk keperluan bisnis mereka mulai dari transaksi keuangan yang paling sederhana hingga pembiayaan bisnis. Hal ini akan sangat mendukung upaya penyebaran kekuatan ekonomi yang lebih adil dan merata untuk seluruh masyarakat, termasuk membuka penciptaan lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat.

Dengan adanya model bisnis seperti ini, maka seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah melalui saluran-saluran pembiayaan khusus yang saat ini belum difasilitasi oleh institusi keuangan konvensional. Pada akhirnya industri fintech akan mampu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan, terutama masyarakat bottom of pyramid.